

ANALISIS POTENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

Fadillah Putra¹, Setyo Tri Wahyudi² dan Ahmad Miftahul Huda³

¹Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 163, Kota Malang
Email: fadillahputra@ub.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 165, Kota Malang
Email: setyo.tw@ub.ac.id

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Kota Malang
Email: ahmadrahul123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika transformasi struktur fiskal daerah serta merumuskan strategi akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan dalam menghadapi fase transisi implementasi Undang-Undang HKPD. Latar belakang studi ini dipicu oleh fenomena pemulihan ekonomi daerah yang solid, ditandai dengan laju pertumbuhan 4,81% dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,90 pada tahun 2024, namun di sisi lain daerah dihadapkan pada tantangan volatilitas kemandirian fiskal akibat perubahan regulasi pusat. Menggunakan pendekatan *mixed-methods*, penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif terhadap data runtun waktu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2020-2024 dengan analisis kualitatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Pemetaan potensi dilakukan menggunakan instrumen Matriks Overlay yang membagi kinerja penerimaan ke dalam empat kuadran strategis (*Prime, Potential, Developing, Underdeveloped*). Hasil penelitian menyingkap adanya pergeseran fundamental dalam postur PAD tahun 2024, di mana Retribusi Daerah melonjak mendominasi kontribusi hingga 63,28% sebagai dampak administratif reklasifikasi pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN. Secara spesifik, analisis Matriks Overlay mengonfirmasi bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan PBB-P2 konsisten sebagai penyangga likuiditas utama (*Prime*). Sementara itu, Pajak Air Tanah menunjukkan kinerja agresif dengan pertumbuhan 35,99% berkat modernisasi alat ukur. Sebaliknya, penelitian mengidentifikasi inefisiensi struktural pada Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet yang konsisten terpuruk di zona *Underdeveloped* dengan laju pertumbuhan negatif. Merespons temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan strategi prioritas yang melibatkan 6 OPD kunci, meliputi: (1) Intensifikasi digital Bapenda melalui *tapping box* dan validasi *host-to-host* BPHTB; (2) Reformasi tata kelola parkir Dishub melalui skema parkir berlangganan terintegrasi; (3) Digitalisasi retribusi pasar dan tiket wisata; serta (4) Optimalisasi pemanfaatan aset *idle* daerah melalui skema KPBU/BOT untuk memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transformasi Fiskal, UU HKPD.

ABSTRACT

This study aims to deeply analyze the dynamics of regional fiscal structural transformation and formulate strategies to accelerate Local Own-Source Revenue (PAD) in Lamongan Regency amidst the transitional phase of Law HKPD implementation. The background of this study is triggered by the solid regional economic recovery, marked by a growth rate of 4.81% and a Human Development Index (HDI) of 75.90 in 2024, while on the other hand, the region faces the challenge of fiscal independence volatility due to central regulatory changes. Using a mixed-methods approach, this research combines quantitative analysis of time-series Budget Realization Report (LRA) data for the 2020-2024 period with qualitative analysis through Focus Group Discussions (FGD). Potential mapping utilizes the Overlay Matrix instrument, which categorizes revenue performance into four strategic quadrants (*Prime, Potential, Developing, Underdeveloped*). The findings reveal a shifting dominance in the 2024 PAD posture, where Regional Retribution jumped to dominate contributions by up to 63.28% as an administrative impact of the reclassification of BLUD revenue and JKN Capitation. Specifically, the Overlay Matrix analysis confirms that Street Lighting Tax (PPJ) and PBB-P2 are consistent as the main liquidity buffers (*Prime*). Meanwhile, Groundwater Tax shows aggressive performance with 35.99% growth due to the modernization of flow meters. Conversely, the study identifies structural inefficiencies in Parking Tax and Swallow Nest Tax, which are consistently located in the *Underdeveloped* zone with negative growth rates. Responding to these findings, this study recommends priority strategies involving 6 key Regional Apparatus Organizations (OPD), including: (1) Bapenda's digital intensification through tapping boxes and host-to-host BPHTB validation; (2) Dishub's parking governance reform through an integrated subscription parking scheme; (3) Digitalization of market levies and tourism tickets; and (4) Optimization of idle regional assets through KPBU/BOT schemes to strengthen long-term fiscal resilience.

Keywords: Local Own-Source Revenue (PAD), Fiscal Transformation, HKPD Law

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal di Indonesia kini memasuki fase transisi yang sangat krusial pasca- pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Regulasi ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah rekonfigurasi fundamental terhadap kewenangan perpajakan daerah yang menuntut pemerintah daerah bertransformasi dari sekadar administrator pemungut pajak menjadi "fiskus cerdas" yang mampu mengorkestrasi potensi ekonomi lokal. Dalam perspektif teori *Fiscal Federalism*, Oates (1999) secara klasik mempostulatkan bahwa pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif dalam mengalokasikan sumber daya publik karena kedekatan informasi dengan preferensi masyarakat lokal. Namun, realitas empiris sering kali menunjukkan adanya *flypaper effect*, di mana daerah lebih responsif terhadap dana transfer pusat daripada berupaya mengoptimalkan pendapatan aslinya sendiri. Bagi Kabupaten Lamongan, tantangan ini hadir di tengah fase pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, menciptakan tekanan ganda (*double pressure*) antara kebutuhan belanja pembangunan yang ekspansif untuk menstimulasi ekonomi dan keterbatasan ruang fiskal yang tersedia.

Kabupaten Lamongan menyajikan lanskap empiris yang unik dan mendesak untuk diteliti dalam konteks transisi regulasi ini. Indikator makroekonomi daerah menunjukkan resiliensi yang cukup kuat, di mana pertumbuhan ekonomi berhasil *rebound* dari kontraksi -2,65% pada tahun 2020 menjadi 4,81% pada tahun 2024, didukung oleh struktur ekonomi yang mulai bergeser dari dominasi sektor pertanian (30,10%) menuju sektor perdagangan (19,80%) dan industri pengolahan (12,23%). Sejalan dengan itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agregat menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp481,75 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp559,46 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini secara teoretis seharusnya mencerminkan *tax buoyancy* atau daya apung pajak yang sehat seiring dengan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 75,90 pada tahun 2024.

Namun, apabila dibedah lebih dalam

(*deep dive analysis*), terdapat fenomena anomali struktural yang sangat ekstrem pada Tahun Anggaran 2024 yang luput dari analisis permukaan. Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencatat lonjakan kontribusi Retribusi Daerah yang tidak preseden, mencapai 63,28% dari total PAD (naik ribuan persen dari hanya 3,23% pada tahun 2020), sementara pos "Lain-lain PAD yang Sah" mengalami kontraksi masif menjadi hanya 1,20%. Analisis forensik terhadap data ini menyingkap bahwa pergeseran tersebut bukanlah hasil dari intensifikasi layanan yang *organic*, melainkan dampak dari *administrative shifting* atau reklasifikasi akuntansi pasca-UU HKPD. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSUD dan Puskesmas, yang sebelumnya dicatat dalam pos Lain-lain PAD, kini dikonsolidasikan ke dalam Retribusi Jasa Umum. Fenomena ini menciptakan "ilusi pertumbuhan" statistik yang jika tidak dianalisis dengan hati-hati dapat menyesatkan pengambilan kebijakan strategis.

Selain isu volatilitas akibat regulasi, struktur fiskal Kabupaten Lamongan juga masih dibayangi oleh ketimpangan performa antar-jenis pajak. Terdapat ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pajak yang bersifat pasif, khususnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yang secara konsisten menyumbang sekitar 42,47% dari total penerimaan pajak daerah. Dominasi PPJ ini menjadikan pendapatan daerah sangat rentan (*vulnerable*) terhadap kebijakan tarif listrik nasional dan tidak mencerminkan upaya aktif (*tax effort*) daerah. Kontras dengan hal tersebut, pajak yang berbasis pada aktivitas ekonomi riil dan menuntut pengawasan lapangan, seperti Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir, justru konsisten berada di zona degradasi. Pajak Walet, misalnya, mencatat pertumbuhan negative - 19,24% pada tahun 2024, sementara Pajak Parkir berkontraksi -7,13%. Kesenjangan kinerja antara pajak pasif yang "gemuk" dan pajak aktif yang "kurus" ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam administrasi perpajakan, mulai dari validitas data wajib pajak hingga potensi kebocoran (*leakage*) di lapangan.

Penelitian terdahulu mengenai PAD, seperti studi Mujiyati et al. (2024) dan Saragih (2023), cenderung berfokus pada dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak. Masih minim literatur yang secara spesifik

membedah dampak *shock* regulasi UU HKPD terhadap transformasi struktur portofolio PAD di tingkat kabupaten/kota menggunakan data empiris terbaru tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut (*gap filling*) dengan tidak hanya melihat pertumbuhan nominal, melainkan membedah kualitas dan keberlanjutan dari pertumbuhan tersebut. Kebaharuan (*novelty*) utama penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan Matriks Overlay dengan dua skenario simulasi: (1) Simulasi Tahunan untuk menangkap volatilitas jangka pendek, dan (2) Simulasi Rata-rata Berbasis Tahun Dasar untuk mengukur ketahanan jangka menengah. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan posisi strategis setiap jenis pajak ke dalam empat kuadran (*Prime, Potential, Developing, Underdeveloped*) secara presisi, memisahkan antara sektor yang benar-benar tumbuh (*organic growth*) dengan sektor yang hanya mengalami pergeseran administratif. Melalui analisis diagnostik ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak hanya normatif, tetapi bersifat teknokratis, terukur, dan solutif untuk memecahkan stagnasi kemandirian fiskal daerah.

METODE

Penelitian ini mengadopsi desain penelitian metode campuran (*mixed-methods*) dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas permasalahan fiskal daerah tidak dapat dijawab hanya dengan angka-angka statistik semata, melainkan memerlukan interpretasi kontekstual dari para pelaksana kebijakan. Data kuantitatif digunakan untuk memetakan tren dan posisi strategis, sementara data kualitatif digunakan untuk memahami hambatan struktural dan institusional di balik angka-angka tersebut.

Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer:

1. Data Sekunder: Diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020-2024, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Lamongan menurut lapangan usaha, data inflasi, serta dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD). Data ini menjadi basis perhitungan analisis kontribusi dan pertumbuhan.

2. Data Primer: Diperoleh melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam dengan *key informants*. Partisipan FGD meliputi pejabat struktural dan fungsional di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), OPD penghasil retribusi (Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan), serta perwakilan asosiasi pelaku usaha. FGD difokuskan untuk memvalidasi temuan kuantitatif dan menggali isu-isu operasional di lapangan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan tiga instrumen analisis utama:

1. Analisis Kontribusi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan suatu jenis pajak atau retribusi terhadap total penerimaan PAD atau total pajak/retribusi daerah. Hasil analisis ini mengindikasikan tingkat dominasi suatu sumber pendapatan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Analisis Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi}_n}{\text{Realisasi}_{total}}$$

Interpretasi: Semakin tinggi persentase, semakin vital peran sumber tersebut dalam struktur fiskal daerah.

2. Analisis Laju Pertumbuhan

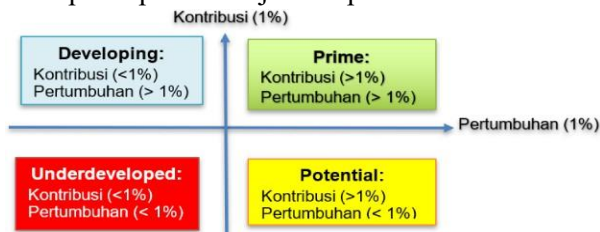
Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan atau tren kenaikan/penurunan penerimaan dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi dan efektivitas upaya intensifikasi/ekstensifikasi. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Analisis Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi}_t - \text{Realisasi}_{t-1}}{\text{Realisasi}_{t-1}}$$

3. Analisis Matriks Overlay

Matriks Overlay merupakan alat analisis portofolio yang menggabungkan hasil analisis kontribusi dan analisis pertumbuhan untuk memetakan posisi strategis sumber pendapatan. Dalam

penelitian ini, digunakan threshold (batas ambang) sebesar 1% untuk mengkategorikan posisi setiap jenis pajak dan retribusi. Matriks ini membagi sumber pendapatan menjadi empat kuadran:



Gambar 1. Matriks Overlay

- 1. Prime (Prima)**
Kontribusi Tinggi (>1%) dan Pertumbuhan Tinggi (>1%). Kategori ini berisi sumber pendapatan yang mapan, dominan, dan terus berkembang. Merupakan "tulang punggung" PAD.
- 2. Potential (Potensial)**
Kontribusi Tinggi (>1%) namun Pertumbuhan Rendah (<1%). Sumber ini memiliki basis besar namun mengalami stagnasi atau kejenuhan. Dalam beberapa variasi interpretasi matriks (seperti yang digunakan dalam laporan ini), kategori Potential juga dapat mencakup sumber dengan pertumbuhan sangat tinggi namun kontribusi belum maksimal, tergantung pada titik potong rata-rata daerah. Namun, berdasarkan definisi standar dokumen, ini mengacu pada stabilitas basis yang besar. Catatan: Dalam analisis hasil nanti, interpretasi akan disesuaikan dengan konteks data spesifik Lamongan di mana sumber dengan pertumbuhan tinggi namun kontribusi kecil sering dikelompokkan sebagai 'Potential' untuk dikembangkan.
- 3. Developing (Berkembang)**
Kontribusi Rendah (<1%) namun Pertumbuhan Tinggi (>1%). Sumber pendapatan yang sedang tumbuh pesat, seringkali merupakan pajak jenis baru atau hasil intensifikasi agresif, namun basis nominalnya masih kecil.
- 4. Underdeveloped (Terbelakang)**
Kontribusi Rendah (<1%) dan Pertumbuhan Rendah (<1%). Kategori ini berisi sumber pendapatan yang kinerjanya buruk, baik dari sisi nominal maupun tren. Seringkali mengindikasikan adanya masalah struktural, kebocoran, atau bisnis ekonomi yang menyusut.

Penelitian ini menerapkan dua skenario simulasi Matriks Overlay untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif:

- 1. Simulasi 1 (Pergerakan Tahunan)**
Menganalisis data year-on-year dari 2021 hingga 2024. Simulasi ini berguna untuk mendeteksi volatilitas jangka pendek dan dampak kebijakan taktis tahunan.
- 2. Simulasi 2 (Kondisi Rata-rata & Tahun Dasar)**
Menggunakan rata-rata aritmatika periode 2020-2024 dan membandingkan tahun dasar 2020 (awal pandemi) dengan 2024. Simulasi ini bertujuan melihat ketahanan (resilience) dan tren jangka menengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan fundamental dalam penelitian ini adalah terjadinya transformasi struktural yang ekstrem pada komposisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2020-2024, meskipun total realisasi PAD menunjukkan tren positif mencapai Rp559,46 miliar pada tahun 2024, terjadi pergeseran dominasi kontribusi yang signifikan antar-komponen pendapatan. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, kontribusi Retribusi Daerah mengalami lonjakan drastis (sudden shock) mencapai 63,28% dari total PAD pada tahun 2024. Angka ini merupakan anomali statistik jika dibandingkan dengan rata-rata historis periode 2020-2023 di mana kontribusi retribusi hanya berkisar pada angka 3-5%. Sebaliknya, pos Lain-lain PAD yang Sah, yang secara tradisional menjadi penyangga utama fiskal daerah dengan kontribusi rata-rata di atas 60%, mengalami kontraksi masif hingga menyisakan kontribusi hanya sebesar 1,20% pada tahun 2024.

Tabel 1. Perbandingan Struktur PAD Kabupaten Lamongan 2020 vs 2024.

Komponen PAD	2020 (%)	2024 (%)	Perubahan
Pajak Daerah	27,83	31,74	+3,91%
			Tumbuh stabil, didorong oleh pemulihan ekonomi dan digitalisasi.

Retribusi Daerah	3,23	63,28	+60,05% Lonjakan Ekstrem. Akibat reklasifikasi pendapatan layanan (BLUD/JKN) ke dalam struktur retribusi jasa umum sesuai UU HKPD.
HPKDYD (BUMD)	2,40	3,79	+1,39%, peningkatan moderat seiring perbaikan kinerja Bank Daerah.
Lain-lain PAD Sah	66,54	1,20	-65,34% Kontraksi Masif. Pos pendapatan yang sebelumnya ditampung disini dipindahkan ke pos Retribusi.

Fenomena "tukar guling" antara komponen Lain-lain PAD yang Sah dengan Retribusi Daerah pada tahun 2024 merupakan dampak langsung dari reformasi manajemen keuangan daerah. Perubahan drastis komposisi PAD Lamongan pada tahun 2024 ini, dimana Retribusi Daerah naik menjadi 63,28% sementara Lain-lain PAD turun menjadi 1,20%, adalah manifestasi langsung dari implementasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD). Regulasi ini mengamanatkan restrukturisasi jenis pajak dan retribusi serta rasionalisasi layanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pendapatan dari layanan kesehatan dan persampahan, yang sebelumnya dicatat secara agregat dalam pos Lain-lain PAD, kini diwajibkan untuk dicatat secara spesifik dan transparan dalam pos Retribusi Jasa Umum.

Fenomena ini dikenal sebagai administrative shifting atau pergeseran administratif. Dalam perspektif teori Fiscal Federalism (Oates, 1999), pergeseran ini memiliki dampak positif karena meningkatkan transparansi fiskal dan akuntabilitas publik (public accountability). Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat melihat secara jelas berapa pendapatan yang diperoleh daerah dari layanan spesifik seperti kesehatan, pasar, dan persampahan. Namun, pergeseran ini juga membawa risiko volatilitas pendapatan. Jika struktur PAD sangat bergantung pada retribusi layanan (seperti jumlah

pasien RSUD atau pedagang pasar), maka setiap guncangan pada kualitas layanan publik atau daya beli masyarakat akan berdampak langsung dan signifikan pada total realisasi PAD. Berbeda dengan pajak yang bersifat memaksa (compulsory) dan relatif stabil, retribusi berbasis pada kontraprestasi langsung.

Analisis data runtun waktu 2020-2024 memperlihatkan terjadinya pergeseran tektonik dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 1, terjadi inversi kontribusi yang ekstrem antara pos Lain-lain PAD yang Sah dengan Retribusi Daerah. Pada tahun 2020, Lain-lain PAD mendominasi struktur pendapatan dengan kontribusi 66,54%, namun angka ini menyusut drastis menjadi 1,20% pada tahun 2024. Sebaliknya, Retribusi Daerah yang sebelumnya hanya berkontribusi 3,23%, melonjak menjadi 63,28% pada tahun 2024.

Fenomena ini bukan mencerminkan perubahan fundamental dalam aktivitas ekonomi riil semata, melainkan dampak dari administrative shifting atau reklasifikasi akuntansi pasca-implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Regulasi ini menuntut standar transparansi yang lebih tinggi dalam pencatatan pendapatan daerah. Secara spesifik, pendapatan yang bersumber dari layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas (termasuk dana Kapitasi JKN), dan retribusi pengelolaan persampahan, kini direklasifikasi secara spesifik ke dalam komponen Retribusi Jasa Umum. Sebelumnya, komponen-komponen ini seringkali dikategorikan secara agregat dalam pos Lain-lain PAD yang Sah.

Implikasi dari transformasi struktural ini sangat signifikan bagi manajemen keuangan daerah Kabupaten Lamongan. Pertama, lonjakan nominal pada pos retribusi mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah kini sangat sensitif terhadap kinerja operasional layanan publik. Penurunan kualitas layanan kesehatan atau fasilitas pasar daerah akan berdampak langsung pada realisasi PAD secara keseluruhan. Kedua, transparansi pencatatan ini memungkinkan evaluasi cost-recovery yang lebih presisi. Pemerintah daerah kini memiliki basis data yang akurat untuk mengukur apakah tarif retribusi yang dikenakan sudah memadai untuk menutup biaya operasional penyediaan layanan, sesuai dengan prinsip efisiensi dalam teori keuangan publik (Halim, 2019). Meskipun demikian, dominasi retribusi (63,28%)

juga menyiratkan risiko fiskal tersendiri. Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat inelastis dan compulsory, retribusi sangat bergantung pada permintaan layanan (service demand). Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD ke depan tidak bisa lagi hanya mengandalkan intensifikasi pemungutan pajak, melainkan harus bertransformasi menjadi manajemen layanan publik berbasis service excellence dan inovasi.

KINERJA PAJAK DAERAH

Meskipun terjadi pergeseran struktur PAD, Pajak Daerah tetap menjadi indikator murni dari kekuatan ekonomi dan kepatuhan masyarakat. Berikut adalah analisis mendalam terhadap kinerja jenis pajak utama :

- 1. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**
 PPJ secara konsisten menyumbang 39- 43% dari total pajak daerah (Rp75,4 miliar pada 2024). Stabilitas ini dikarenakan sifat konsumsi listrik yang inelastis. Kategori PPJ sebagai Prime dalam matriks overlay menunjukkan bahwa sektor ini adalah penyangga utama likuiditas daerah. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada PPJ berisiko jika terjadi perubahan kebijakan tarif listrik nasional atau insentif energi terbarukan yang mengurangi basis pajak PLN.
- 2. PBB-P2**
 Berkontribusi 28,14% (Rp49,9 miliar pada 2024). Meskipun nominalnya besar, pertumbuhannya cenderung fluktuatif dan sempat melambat. Masalah klasiknya adalah basis data SISMIO yang belum sepenuhnya mutakhir dan penetapan NJOP yang seringkali di bawah harga pasar. Namun, tren pertumbuhan 11,69% pada 2024 menunjukkan adanya upaya intensifikasi yang mulai membuahkan hasil.
- 3. BPHTB**
 Sebagai pajak berbasis transaksi, BPHTB (kontribusi 15,98%) sangat sensitif terhadap iklim investasi properti. Pertumbuhan 20,68% pada 2024 mengindikasikan pulihnya sector real estate dan maraknya alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri di Lamongan.
- 4. Pajak Restoran & Hiburan**
 Pajak Restoran tumbuh impresif (52,14% di 2022) seiring dengan pelonggaran restriksi sosial. Ini mencerminkan keberhasilan branding kuliner Lamongan. Sebaliknya, Pajak Hiburan masih berjuang untuk stabil, mencerminkan terbatasnya variasi industri hiburan di kabupaten ini.

- 5. Pajak Air Tanah & MBLB**
 Meskipun kontribusinya kecil (<1%), Pajak Air Tanah mencatat pertumbuhan 35,99% pada 2024. Ini adalah sinyal kuat bahwa banyak titik pengambilan air tanah (terutama industri) yang baru terdata atau tertagih. Potensi loss masih tinggi mengingat banyaknya industri yang menggunakan sumur bor tanpa meterisasi yang akurat. Lonjakan ini bukan sekadar kenaikan volume pemakaian, melainkan hasil konkret dari strategi ekstensifikasi melalui pemasangan alat catat meter (flow meter) digital. Teknologi ini berhasil meminimalisir asimetri informasi pada titik pengambilan air industri yang sebelumnya hanya didasarkan pada taksiran manual, membuktikan bahwa italisasi adalah kunci optimalisasi pajak berbasis self-assessment.
- 6. Pajak Parkir & Walet**
 Kedua pajak ini konsisten berada di zona merah (Underdeveloped). Pajak Parkir (kontribusi 0,64%) terkendala tingginya kebocoran akibat juru parkir liar dan sistem manual. Pajak Walet lebih parah lagi, dengan pertumbuhan negatif (- 19,24% di 2024), mencerminkan kesulitan petugas pajak menembus "benteng" pengusaha walet dan ketiadaan data produksi riil.

Analisis Matriks Overlay

Analisis Matriks Overlay memberikan diagnosis yang lebih presisi mengenai posisi "kesehatan" setiap sumber penerimaan.

Simulasi 1: Dinamika Tahunan (2021-2024)

Tabel 2. Matrik *Overlay* untuk pergerakan data tahunan.

Sumber Penerimaan	2021*		2022*		2023*		2024*	
	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
A. PAJAK	22,23	0,26	30,35	14,64	30,30	3,96	31,74	10,84
a. Pajak Hotel	1,00	30,85	1,18	34,64	1,27	11,85	1,20	4,69
b. Pajak Restoran	4,24	116,34	5,36	52,74	5,97	15,77	5,72	6,23
c. Pajak Hiburan	1,24	(45,90)	3,01	177,27	3,37	16,58	2,91	(4,63)
d. Pajak Reklame	1,56	4,84	1,48	(13,68)	1,71	21,08	1,56	0,29
e. Pajak Penerangan Jalan	41,35	4,01	42,24	17,12	43,08	6,03	42,47	9,27
f. Pajak Pasar	0,63	(1,33)	0,77	43,31	0,76	3,31	0,68	(7,13)
g. Pajak Air Tanah	0,48	37,68	0,61	8,72	0,51	15,12	0,62	35,99
h. Pajak Sarang Burung Walet	0,00	(85,10)	0,01	504,74	0,01	(6,82)	0,00	(59,24)
i. Pajak MBLB	1,09	66,00	0,83	(12,39)	0,71	(11,63)	0,76	19,34
j. PBBP2	32,46	1,77	27,96	(15,15)	27,93	3,87	28,14	11,69
k. BPHTB	15,75	(4,75)	16,72	21,85	14,67	(8,73)	15,98	20,68
B. RETRIBUSI	2,86	(8,19)	4,65	65,13	3,56	(20,29)	63,28	1.781,40
a. Retribusi Jasa Umum	71,29	(2,24)	82,70	91,56	53,51	(68,41)	97,19	3.316,42
b. Retribusi Jasa Usaha	17,97	9,67	15,10	38,73	31,60	66,82	1,86	10,63
c. Retribusi Perizinan Tertentu	30,74	(65,24)	2,20	(66,19)	14,88	439,37	0,95	19,96
C. Hasil Pengalokasian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,17	65,54	3,39	(10,31)	4,28	31,55	3,79	(6,28)
D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	72,23	36,24	61,61	(28,38)	61,85	4,54	1,20	(97,93)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024. Diolah
 Keterangan: *Pertumbuhan "Kontribusi" dan "Pertumbuhan" menggunakan nilai sebelumnya.

Berdasarkan data realisasi kinerja tahun 2024 yang tersaji pada Tabel 2, penelitian ini melakukan pemetaan posisi strategis dengan menggunakan ambang batas rata-rata 1% untuk variabel kontribusi dan pertumbuhan. Logika

pemetaan ini bertujuan untuk mendiagnosis "kesehatan" portofolio pendapatan daerah: memisahkan sektor yang telah mapan (*mature*), sektor yang sedang tumbuh (*emerging*), dan sektor yang mengalami disfungsi. Kristalisasi hasil pemetaan tersebut menghasilkan kategorisasi kuadran Simulasi 1 sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kategorisasi Matrik *Overlay* Simulasi 1.

Kuadran	Jenis Penerimaan (Kondisi 2024)
Prime	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hotel • Pajak Restoran • Pajak Penerangan Jalan • PBB-P2 • BPHTB • Retribusi Jasa Umum • Retribusi Jasa Usaha
Potential	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Hiburan • Pajak Reklame • HPKDYD • Lain-lain PAD yang Sah
Developing	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Air Tanah • Pajak MBLB
Under developed	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Parkir • Pajak Sarang Burung Walet

1. Kategori PRIME

Kelompok ini merepresentasikan tulang punggung fiskal daerah yang bekerja optimal. Masuknya Pajak Hotel dan Pajak Restoran ke posisi Prime menjadi indikator valid bahwa sektor pariwisata telah mengalami pemulihan penuh (*full recovery*) dan kembali menjadi motor penggerak ekonomi riil pascapandemi. PPJ, PBB-P2, dan BPHTB menunjukkan kinerja organik yang solid sebagai penyangga likuiditas. Namun, dominasi Retribusi Jasa Umum di kuadran ini harus dimaknai sebagai anomali administratif akibat kebijakan reklasifikasi pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN, yang secara statistik melambungkan kontribusi dan pertumbuhan. Keberadaan Retribusi Jasa Usaha pada kuadran Prime juga mengonfirmasi keberhasilan strategi intensifikasi pemanfaatan kekayaan daerah (sewa aset/lahan) yang mampu memberikan imbal hasil signifikan pada tahun berjalan.

2. Kategori POTENTIAL

Posisi HPKDYD (Bagian Laba BUMD) di kuadran ini mengindikasikan adanya koreksi kinerja keuangan pada perusahaan daerah, sehingga setoran dividen mengalami kontraksi

meskipun secara nominal masih memberikan kontribusi signifikan. Masuknya Pajak Reklame dan Hiburan ke posisi ini menandakan adanya titik jenuh (*saturation point*) pada model pemungutan konvensional. Melambatnya pertumbuhan mengisyaratkan perlunya transformasi regulasi untuk menangkap potensi ekonomi digital (seperti videotron dan hiburan modern) yang belum tergarap optimal.

3. Kategori DEVELOPING

Sektor ini menunjukkan fenomena *rising star*. Pajak Air Tanah mencatat akselerasi pertumbuhan tertinggi mencapai 35,99%. Lonjakan ini berkorelasi positif dengan intervensi teknologi melalui pemasangan flow meter digital pada industri pengguna air tanah. Meskipun kontribusi nominalnya saat ini masih di bawah 1% (*Low Share*), tingginya elastisitas pertumbuhan menempatkan sektor ini sebagai prioritas utama ekstensifikasi untuk didorong masuk ke kuadran Prime di masa depan.

4. Kategori UNDERDEVELOPED

Kedua jenis pajak ini mengalami *market failure* (kegagalan pasar) dalam konteks administrasi perpajakan. Pertumbuhan negatif yang persisten pada tahun 2024 menjadi bukti empiris bahwa metode pemungutan manual (*official assessment* tanpa data valid untuk Walet, dan karcis sobek untuk Parkir) memiliki celah kebocoran (*leakage*) yang sangat tinggi. Posisi ini adalah "alarm keras" bahwa tanpa reformasi radikal, kedua sektor ini akan terus menjadi beban inefisiensi dalam struktur PAD.

Simulasi 2: Ketahanan Jangka Menengah (Tahun Dasar 2020)

Tabel 3. Matrik *Overlay* untuk pergerakan data rata-rata dan tahun dasar 2020.

Sumber Penerimaan	Kondisi 1		Kondisi 2	
	Rata-Rata 2020-2024		Tahun Dasar 2020	
	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
A. PAJAK	28.49	7.43	0.37	0.32
Pajak Hotel	1.11	15.51	0.00	0.75
Pajak Restoran	5.19	14.45	0.02	0.57
Pajak Hiburan	2.57	35.86	0.01	0.67
Pajak Reklame	1.72	3.14	0.01	0.10
Pajak Penerangan Jalan	41.80	9.11	0.16	0.41
Pajak Parkir	0.68	9.04	0.00	0.34
Pajak Air Tanah	0.48	24.38	0.00	1.34
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	98.38	0.00	(0.32)
Pajak MBLB	0.81	15.35	0.00	0.54
PBBP2	29.69	4.02	0.10	0.17
BPHTB	15.94	7.21	0.06	0.28
B. RETRIBUSI	15.42	454.51	0.73	21.74
Retribusi Jasa Umum	74.33	839.33	0.71	32.00
Retribusi Jasa Usaha	16.31	31.46	0.01	1.81
Retribusi Perizinan Tertentu	9.35	86.97	0.01	0.20
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.41	20.13	0.04	0.83
D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.69	(21.39)	0.01	(0.98)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2020-2024, diolah

Berbeda dengan simulasi tahunan yang memotret volatilitas jangka pendek, Simulasi 2 bertujuan mengukur ketahanan fiskal (fiscal resilience) jangka panjang. Simulasi ini menggunakan basis data rata-rata pertumbuhan dan kontribusi selama periode lima tahun (2020–2024). Penting untuk dicatat bahwa periode ini mencakup fase crash pandemi Covid-19 (2020) dan fase pemulihan (recovery), sehingga analisis pada bagian ini sangat dipengaruhi oleh fenomena Low Base Effect.

Ketika Simulasi 2 menggunakan tahun dasar 2020, terjadi perubahan drastic dalam klasifikasi di hampir semua komponen PAD. Sebagian besar sumber pendapatan berpindah ke kategori Underdeveloped, termasuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, PPJ, PBB-P2, BPHTB, dan banyak pos retribusi. Hal ini sangat wajar karena tahun 2020 merupakan tahun awal pandemi yang menyebabkan penerimaan PAD mengalami kontraksi besar. Ketika tahun dasar yang rendah digunakan sebagai pembanding, pertumbuhan menuju tahun 2024 menjadi terlihat kecil, bahkan pada beberapa komponen menjadi negatif, sehingga menurunkan skor pertumbuhan dan mendorong banyak komponen masuk kategori Underdeveloped.

Tabel 4. Kategorisasi Matrik Overlay Simulasi 2.

Kuadran	Jenis Penerimaan (Rata-Rata)
Prime	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Restoran • Pajak Reklame • PPJ • BPHTB
Potential	<ul style="list-style-type: none"> • Lain-lain PAD yang Sah
Developing	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Sarang Burung Walet • Pajak Parkir • Pajak Air Tanah • Pajak Hiburan
Under developed	<ul style="list-style-type: none"> • Nihil

1. Prime: Berbeda dengan kondisi 2024, secara rata-rata Pajak Restoran dan Pajak Reklame masuk kategori PRIME. Ini menunjukkan bahwa meskipun melambat di 2024, tren jangka panjang kedua sektor ini sangat positif dan memiliki daya tahan (resilience) tinggi.
2. Potential: Konsisten di kuadran ini. Memiliki kontribusi historis yang dominan (rata-rata >50%), namun tren pertumbuhannya negatif/stagnan. Fenomena ini adalah sinyal struktural yang

sangat kuat. Bahwa satu-satunya sektor di kuadran Potential (Kontribusi Besar, Pertumbuhan Rendah) adalah Lain-lain PAD, mengonfirmasi teori siklus hidup pendapatan daerah. Pos ini telah memasuki fase decline atau "matahari terbenam" akibat perubahan regulasi pusat. Ketergantungan fiskal daerah yang selama ini ditopang oleh pendapatan non-pajak (seperti Kapitasi dan BLUD) harus segera diakhiri, karena tren jangka panjangnya menunjukkan kontraksi permanen

3. Developing: Pajak Walet dan Parkir masuk ke sini karena rata-rata pertumbuhannya terlihat tinggi saat rebound dari titik nol pandemi. Namun, posisi ini kontradiktif dengan realitas 2024 yang minus. Secara statistik "berkembang", namun secara aktual bermasalah. Pertumbuhan riil terjadi pada Pajak Air Tanah, tingginya rata-rata pertumbuhan sektor ini sejalan dengan data tahunan 2024, yang mengonfirmasi bahwa kenaikan kinerjanya adalah hasil intervensi teknologi (flow meter) yang berkelanjutan, bukan kebetulan statistic. Ilusi statistic terjadi pada Pajak Walet dan Pajak Parkir. Masuknya kedua sektor ini ke kategori Developing (Tumbuh Tinggi) dalam data rata-rata adalah bias dari perhitungan Low Base Effect. Karena pada tahun dasar 2020 realisasi mereka sangat rendah akibat pandemi, maka pertumbuhan di tahun-tahun berikutnya terlihat tinggi secara persentase. Namun, jika disandingkan dengan Simulasi 1 (2024) di mana mereka tumbuh negatif, status "Developing" ini adalah False Positive. Secara riil, kedua sektor ini masih bermasalah.
4. Underdeveloped: Kosongnya kuadran ini pada simulasi jangka panjang menunjukkan bahwa seluruh sektor PAD Lamongan sebenarnya memiliki tren pemulihan positif jika ditarik dari garis start pandemi (2020). Tidak ada sektor yang benar-benar mati secara permanen.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Sintesis hasil analisis kontribusi, pertumbuhan, dan Matriks Overlay di atas membawa implikasi manajerial yang serius bagi desain kebijakan fiskal Kabupaten Lamongan pasca-implementasi UU HKPD. Temuan ini menuntut perubahan paradigma dari sekadar

administrative compliance (kepatuhan administrasi) menjadi fiscal entrepreneurship. Pertama, Mitigasi Risiko Ketergantungan Pajak Pasif. Dominasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di kuadran Prime pada kedua simulasi memang memberikan stabilitas likuiditas. Namun, dalam perspektif manajemen risiko, kondisi ini menciptakan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability). Ketergantungan pada pajak yang berbasis konsumsi energi (listrik) berarti PAD Lamongan tidak memiliki korelasi kuat dengan daya saing ekonomi lokal. Jika terjadi perubahan regulasi tarif listrik nasional atau insentif energi terbarukan, basis pajak ini akan tergerus. Oleh karena itu, strategi hedging diperlukan dengan memperkuat sektor Pajak Air Tanah dan MBLB (kuadran Developing) agar portofolio pendapatan lebih seimbang antara pajak konsumtif dan pajak berbasis sumber daya.

Kedua, Transformasi Manajemen Layanan Retribusi. Lonjakan kontribusi Retribusi Daerah hingga 63,28% (Simulasi 1) akibat reklasifikasi BLUD mengubah DNA fiskal daerah. Pemerintah daerah tidak lagi bisa memandang retribusi sebagai pungutan semata, melainkan sebagai "harga layanan" (service charge). Implikasinya, setiap Rupiah yang dipungut harus dikompensasi dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang terukur. Jika kualitas layanan RSUD atau Pasar menurun, dampaknya bukan hanya komplain publik, tetapi langsung memukul mayoritas struktur PAD.

Ketiga, Reformasi Kelembagaan BUMD dan Parkir. Posisi HPKDYD (BUMD) di kuadran Potential dan Pajak Parkir di kuadran Underdeveloped (pada Simulasi 1) mengirimkan sinyal inefisiensi struktural. Implikasinya, BUMD tidak bisa lagi beroperasi dengan mentalitas birokrasi, tetapi harus berbasis profitabilitas murni. Sementara untuk parkir, kegagalan sistem konvensional menuntut political will untuk beralih ke teknologi (parkir berlangganan/digital) guna memutus rantai kebocoran yang terbukti kronis secara statistik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa postur fiskal Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami transformasi struktural yang fundamental, ditandai dengan pergeseran dominasi kontribusi dari sektor "Lain-lain PAD yang Sah" ke "Retribusi Daerah" yang kini menguasai 63,28% total penerimaan.

Lonjakan drastis ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah bukan semata didorong oleh pertumbuhan ekonomi organik, melainkan dampak administrative shifting pasca-implementasi UU HKPD yang mereklasifikasi pendapatan BLUD dan Kapitasi JKN menjadi Retribusi Jasa Umum. Implikasi strategis dari fenomena ini adalah ketergantungan fiskal daerah kini beralih menjadi sangat sensitif terhadap fluktuasi kinerja layanan publik (service-based revenue), menuntut standarisasi pelayanan yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas penerimaan.

Di sisi lain, analisis Matriks Overlay membuktikan bahwa sektor pariwisata memiliki tingkat resiliensi yang teruji. Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang konsisten menunjukkan kinerja positif—baik dalam simulasi tahunan maupun jangka panjang—menegaskan keberhasilan transformasi ekonomi daerah yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor tradisional menuju sektor jasa sebagai mesin pertumbuhan riil (real growth engine). Temuan ini diperkuat oleh efektivitas intervensi teknologi pada Pajak Air Tanah yang mencatat pertumbuhan tertinggi (35,99%) berkat penerapan flow meter digital, membuktikan bahwa modernisasi alat ukur adalah kunci menutup celah asimetri informasi volume pemakaian.

Sebaliknya, penelitian ini menyingkap adanya kegagalan pasar (market failure) yang persisten pada sektor-sektor yang masih dikelola secara manual. Kontraksi kinerja yang konsisten pada Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Parkir di zona Underdeveloped menjadi bukti empiris bahwa metode pemungutan berbasis self-assessment tanpa data pembanding dan sistem parkir konvensional memiliki celah kebocoran (leakage) yang kronis. Kondisi ini, ditambah dengan posisi "Lain-lain PAD yang Sah" yang terkunci di kuadran Potential dengan tren pertumbuhan negatif, menjadi sinyal berakhirnya era ketergantungan pada pendapatan non-pajak. Masa depan kemandirian fiskal Lamongan tidak lagi terletak pada dividen atau pendapatan lain-lain, melainkan pada optimalisasi intensifikasi Pajak Daerah berbasis digital dan profesionalisme pengelolaan Retribusi Jasa Umum.

REKOMENDASI

Penelitian ini merekomendasikan pelaksanaan program prioritas yang dipetakan

kepada 6 (enam) Perangkat Daerah kunci sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
Program Utama: Digitalisasi Pelayanan dan Administrasi Pendapatan Daerah.
Kegiatan:
 - 1) Pemasangan alat rekam data transaksi usaha (tapping box) pada wajib pajak potensial.
 - 2) Pemutakhiran data Peta Zona Nilai Tanah (ZNT).
 - 3) Integrasi sistem pembayaran (host-to-host) dan kanal digital.
Indikator Kinerja: Jumlah alat rekam terpasang dan persentase akurasi data NJOP.
Target: Terpasangnya alat rekam transaksi pada wajib pajak prioritas dan tersedianya peta ZNT digital.
2. Dinas Perhubungan (Dishub)
Program Utama: Optimalisasi Retribusi Pelayanan Parkir.
Kegiatan:
 - 1) Penerapan sistem parkir berlangganan terintegrasi. Indikator Kinerja: Persentase penurunan tingkat kebocoran retribusi parkir.
Target: Terlaksananya skema parkir berlangganan dan peningkatan realisasi retribusi parkir.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
Program Utama: Peningkatan Pelayanan dan Retribusi Pasar.
Kegiatan:
 - 1) Penerapan E-Retribusi Pasar Daerah.
 - 2) Intensifikasi pelayanan tera dan tera ulang.
Indikator Kinerja: Jumlah pasar yang menerapkan pembayaran non-tunai.
Target: Meningkatnya kepatuhan wajib retribusi dan akuntabilitas penerimaan pasar.
4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP)
Program Utama: Integrasi Perizinan Berusaha dan Kepatuhan Pajak.
Kegiatan:
 - 1) Implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada layanan perizinan.
 - 2) Pertukaran data perizinan dengan Bapenda secara real-time.
 - 3) Indikator Kinerja: Persentase izin usaha yang terverifikasi status perpajakannya.
Target: Terintegrasinya data perizinan dengan sistem perpajakan daerah.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)
Program Utama: Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata.
Kegiatan:
 - 1) Penerapan sistem tiket elektronik (E-Ticketing) di objek wisata.
 - 2) Kerjasama bundling promosi wisata dengan sektor pajak (hotel/restoran).
Indikator Kinerja: Jumlah kunjungan wisatawan dan akurasi pendapatan tiket.
Target: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata.
6. Sekretariat Daerah (Bagian Kerjasama dan Aset/BPKAD)
Program Utama: Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
Kegiatan:
 - 1) Inventarisasi aset idle.
 - 2) Penyusunan skema KPBU/BOT.
 - 3) Digitalisasi kerja sama daerah.
 - 4) Restrukturisasi pendapatan non-reguler.
Indikator Kinerja: Jumlah kontrak kerjasama pemanfaatan aset yang terealisasi.
Target: Meningkatnya pendapatan dari pemanfaatan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Aritenang, A. (2020). "Fiscal Decentralization and Local Government Revenue Performance in Indonesia". *Journal of Public Administration and Policy*, Vol. 15(2), 122–138.
- Brodjonegoro, B. (2019). *Reformasi Fiskal Daerah: Optimalisasi Pendapatan dan Tata Kelola BUMD dalam Kerangka Desentralisasi Keuangan*. LP3ES, Jakarta.
- Fitrianti, R., Zaenal, M., Fattah, S., dan Hidayah, N. (2025). "Flypaper Effect: Analysis of Financial Transfers from the Central Government to Provincial Regions in Indonesia". *Public and Municipal Finance*, Vol. 14(1), 54–64.
- Halim, A. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah: Teori, Praktik, dan Isu-isu Strategis*. UPP STIM

- YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning, Boston.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mujiyati, M., Zulfikar, Z., Witono, B., dan Utomo, I. C. (2024). "The Impact of Digital Platforms in Tax Administration Services on Local Government Tax Revenues: Evidence from Indonesia". *Public and Municipal Finance*, Vol. 13(2), 195–203.
- Oates, W. E. (1999). "An Essay on Fiscal Federalism". *Journal of Economic Literature*, Vol. 37(3), 1120–1149.
- Saragih, A. H., Reyhani, Q., Setyowati, M. S., dan Hendrawan, A. (2023). "The Potential of an Artificial Intelligence (AI) Application for the Tax Administration System's Modernization: The Case of Indonesia". *Artificial Intelligence and Law*, Vol. 31, 491-514.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Zamzami, F., dan Rakhman, F. (2023). "Determinants of Regional Financial Performance in Indonesia". *Journal of Accounting and Investment*, Vol. 24(1), 12-25.

Laporan Data dan Dokumen Pemerintah

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2024). *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Lamongan, Lamongan.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Timur Februari 2024*. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Surabaya.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 (Audited)*. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Lamongan.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2025). *Laporan Akhir Kajian PAD Kabupaten Lamongan 2025: Analisis Potensi & Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah*. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Lamongan.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Berita Negara RI, Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah, Lamongan.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2024). *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Nilai Jual dan Besaran Persentase Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Berita Daerah, Lamongan.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2024). *Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Nilai Sewa Reklame dan Besaran Jaminan Bongkar di Kabupaten Lamongan*. Berita Daerah, Lamongan.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. (2024). *Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/1350/KEP/413.013/2024 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025*. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Lamongan.